

“Berburu” Gelar Ala Guru

Oleh: Dede Kosasih*

Harus diakui bahwa munculnya kepanikan di jagat pendidikan dewasa ini salah satu pemicunya adalah pasca terbitnya UU Guru dan Dosen. Para guru umumnya merasa tersentak dan ketar-ketir dengan adanya tuntutan kualifikasi guru untuk mengikuti sertifikasi harus berpendidikan D4/S1. Maka dengan adanya tuntutan ini ribuan guru berebut kursi di LPTK (PR, 27/2/2006).

Akibatnya para guru sekarang ini memang sedang dilanda kepanikan yang luar biasa -terutama guru SD- mulai anjang-ancang berlomba meraih gelar sarjana. Pada awalnya mereka mungkin merasa tenang karena telah menuntaskan tuntutan dengan mengikuti persamaan tingkat pendidikan menjadi D2 beberapa tahun lalu. Tahu-tahu, sekarang muncul kekhawatiran baru. Analoginya ibarat orang yang sedang terlelap tidur, kemudian dibangunkan secara tiba-tiba, akibatnya *ngagurubug* dan *walahwah-weuleuhweuh*. Itulah kondisi para guru saat ini. Pantas saja Prof. Otto Sumarwoto *keukeuh* pada pandangannya, bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang pelupa yang nantinya berakibat pada sifat lain yang sama buruknya yakni *kagetan* (Kompas, 26/02/06).

Paniknya para guru, sumbernya adalah buah sebab-akibat (*kausalitas*). Sebab, jika guru lulus dan mendapat sertifikat pendidik, maka akibatnya harapan nan indah telah terbentang di pelupuk mata. Selain menerima tunjangan fungsional-mereka pun dijanjikan menerima tunjangan profesi yang besarnya satu kali gaji pokok. Yang semuanya itu bermuara pada peningkatan kesejahteraan dan perbaikan nasib mereka.

Namun disadari atau tidak, peningkatan kesejahteraan dan perbaikan nasib itu pada dasarnya akan bermuara pada tercapainya kesenangan. Sedangkan kesenangan itu cenderung ‘membakar’ kita menjadi rakus dan serakah. Diperparah lagi oleh dominasi budaya dunia dewasa ini yang berpusat pada materi. Materi telah dijadikan panglima dan pemandu cita-cita kehidupan, maka setiap keinginan itu bukan sekedar hasrat *‘to have’* melainkan *‘to have more and more’*. Sedangkan tercukupinya materi, bukan sekedar harta, tetapi menyangkut juga kedudukan dan kekuasaan. Semua itu biasanya dijadikan sebagai parameter keberhasilan seseorang. Itulah paradigma dunia modern sekarang ini tentang konsep bahagia dan sukses.

Karena rujukan yang serba materi itulah pada akhirnya berpengaruh juga terhadap cara pandang maupun gaya hidup (*life style*) kita. Inilah awal dari suatu proses yang akhirnya mengarah pada perubahan orientasi nilai-nilai, sikap, dan mental. Implikasi dalam hal cara meraihnya pun kadangkala tanpa memperhitungkan batal-haram, cenderung melanggar hukum (cara illegal) dan mendewakan cara menerabas.

Maka jangan heran bila cita-cita mulia dan tujuan awal pemerintah untuk mengembalikan harkat dan martabat guru jadi lebih baik, yang tertuang dalam UU Guru dan Dosen itu, akan kandas begitu saja, karena terkesan hanya mengedepankan aspek formalitasnya semata.

Guru vs LPTK

Persoalan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi (S1) bagi guru tidaklah sesederhana yang kita bayangkan. Mulai dari persiapan biaya yang tidak sedikit. Setidaknya dana yang harus dianggarkan untuk masuk hingga lulus S1 itu berkisar 10 jutaan, yang berakibat harus “ngaduakeun huap”. Dan itupun belum dihitung ongkos perjalanan, buku dan waktu yang dikorbankan.

Ditambah lagi, para guru yang akan melanjutkan pendidikan dituntut ekstra waspada dan lebih jeli dalam memilih lembaga LPTK (swasta), jangan-jangan yang dikeluarkan oleh institusi itu hanya selembaar ijazah yang tidak diakui oleh tempatnya bekerja dan yang lebih parahnya lagi ijazah yang dikeluarkannya itu bodong alias palsu seperti dalam kasus maraknya obral gelar yang menyeret para selebritis kita.

Belum lagi persoalan lain muncul ketika seorang guru tidak menemukan program studi yang tidak terakreditasi, yang sesuai dengan bidangnya. Misalnya, jika seorang guru matematika di sebuah kabupaten, hendak melanjutkan pendidikan S1 di Program Studi Pendidikan Matematika, namun tidak ada program studi tersebut, sedangkan program studi

yang terakreditasi itu tersedia di kabupaten lain. Di daerahnya, prodi yang tersedia hanya beberapa jurusan yang tidak relevan dengan minat atau keinginannya. Di situlah terjadi *dilematis psikologis* antara mengambil program studi di kabupaten lain atau mencoba memaksakan diri mengambil prodi yang ada di daerahnya yang notabene akan berimbas pada wilayah kompetensi guru itu sendiri.

Pendidikan dan sertifikasi guru saat ini memang menjadi arena tarik ulur berbagai kepentingan, terutama oleh para pengelola LPTK dan guru. Maka berlakulah hukum ekonomi, LPTK menjadikan guru (karena sedang panik) sebagai sasaran tembak untuk meraup keuntungan yang melimpah. Guru yang panik biasanya secara psikologis mereka sangat mudah dimanfaatkan. Maka di situlah biasanya LPTK memanfaatkan kesempatan dengan iming-iming fasilitas dan berbagai kemudahan dengan tren menjemput bola. Tren menjemput bola ini sering diindentikan dengan program belajar jarak jauh (PR, 27/2/06).

Aneka persoalan yang menyeruak dalam fenomena ini, seharusnya menjadi pertimbangan, sebelum menerbitkan peraturan pemerintah sebagai aturan pelaksana UU Guru dan Dosen. Jangan sampai UU Guru dan Dosen hanya sebagai angin surga yang meniupkan janji peningkatan kesejahteraan dan kompetensi. Jangan-jangan karena proses yang tidak terjaga, tujuan tidak tercapai ujung-ujungnya akan menuai masalah baru.

Kekhawatiran yang berkembang dari fenomena ini adalah maraknya praktik-praktik yang tidak terpuji, baik dilakukan para guru (karena sedang panik) maupun LPTK yang sedang merancang strategi 'menyergap mangsa'. Bagi LPTK melimpahnya *fulus*, sedangkan bagi mahasiswa yang penting lulus, jadi sarjana, tanpa bersusah-susah menggapainya.

Di sinilah pihak guru harus waspada. Karena pihak LPTK yang jeli akan libido bisnisnya dengan berbagai cara dan strategi (praktik ilegal), akan menyergap dan menebar *pitapak* bagi (guru) yang masih *baruruten* dari berbagai arah dan membabi buta.

Berkaitan dengan praktik yang tidak terpuji itu, pada tahun 1970-an almarhum Mochtar Lubis pernah mengungkapkan ciri-ciri manusia Indonesia. Ciri-ciri buruk bangsa kita, menurut wartawan, yang juga budayawan, antara lain malas, aji mumpung dan suka menerabas. Agaknya ciri-ciri itulah menjadi kian melekat sekarang ini. Perilaku yang dalam benak bangsa Indonesia dewasa ini dianggap sesuatu yang galib dan jamak.

Senada dengan pernyataan Mochtar Lubis, Koentjaraningrat dalam bukunya *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, bahwa mentalitas menerabas itu pada dasarnya juga dapat disamakan dengan "mentalitas mencari jalan paling gampang". Karena etos kerja para guru lemah dan malas, maka ditempuhlah cara-cara yang gampang seperti jalan menerabas. Karena LPTK lebih mengedepankan aji mumpung, maka dilakukanlah cara jalan pintas.

Manakala memilih jalan pintas sebagai cara ilegal, berarti peran orang lain dipinggirkan. Mereka tidak mau tahu dampaknya bagi kebanyakan orang. Intinya mereka tidak memperdulikan orang lain. Tujuan yang terpenting dalam benaknya adalah menguntungkan diri sendiri. Jadi, fenomena itu boleh dibilang sebagai representasi bangsa yang carut marut, mencerminkan bangsa kita yang telah kehilangan adab, mudah memilih jalan pintas, suka yang ilegal dan tidak peduli orang lain.

Formalitas sama dengan Formalin (isme)?

Melihat banyaknya animo guru untuk mengejar gelar dalam rangka sertifikasi, kini memang menjadi semacam cita-cita yang harus diraih. Namun dalam proses peraihan gelar, ada kesan mereka hanya mengejar aspek formalitas semata, dengan cara yang semudah-mudahnya dan instans. Pencapaian gelar cenderung tidak diimbangi dengan peningkatan wawasan, sikap dan kompetensi guru. Bahkan mutu dan relevansinya dengan peningkatan karier profesional mereka tampaknya tidak terlalu menjadi perhatian utama.

Karena tujuannya hanya sebatas formalitas, maka hasilnya pun "selintas". Selintas itu identik dengan "*wawayagon*" hanya "asal-asalan", asal jadi sarjana, asal lulus, karena prosesnya pun tidak disertai dengan niat yang tulus.

Kegiatan apapun dalam cara formalitas, cenderung sangat rentan disusupi oleh etos modernitas yang berkiblat pada etos kerakusan (keserakahan) seperti terurai di atas. Kerakusan atau keserakahan hakekatnya menurut Toto Suparto (Kompas, 28/1/06) merupakan bentuk formalin (isme) yang baru-baru ini menjadi kontroversi.

Cara pandang formalitas hampir sama dengan gejala formalin (isme) yang dipraktikkan oleh para pengguna formalin dalam perilaku ekonomi bangsa kita ini, yakni mengarah pada

gejala kerakusan (*greed*). Karena preokupasinya bukan sekedar '*the economics of needs*' melainkan '*the economics of wants*.' Para pengusaha (pedagang) "nakal":mie basah, tahu, ikan asin sebagai pelaku ekonomi, adalah representasi gejala kerakusan dan mendewakan jalan pintas itu agar dagangannya lebih awet dan meraup untung yang melimpah. Padahal sejatinya, jalan yang benar adalah bahan pengawet yang aman, namun harganya jelas jauh lebih mahal. Maka konsekuensinya, semakin mahal biaya produksi, berarti semakin susut keuntungan yang diperoleh.

Akibatnya, moralitas disingkirkan. Sebab moralitas itu menuntut supaya kita menyeimbangkan kepentingan kita dengan kepentingan yang lain. Kepentingan produsen (misalnya,tahu) dalam benaknya adalah keuntungan besar sehingga diupayakan barang dagangannya bisa bertahan beberapa hari. Kalau dibiarkan sehari sudah rusak (busuk) tentu akan berbuntut kerugian. Sementara kepentingan konsumen adalah mengkonsumsi tahu yang sehat, dan tidak membahayakan tubuh. Namun, sikap egois itu tidak mempertemukan antara "tahu awet" dengan "tahu sehat".

Hal ini merupakan cerminan bangsa kita yang egois, *ngeunah Eon teu ngeunah Ehe*. Inilah yang dimaksud oleh filsuf James Rachel sebagai *egoisme-etis*, sebagaimana masih dikutip Toto Suparto. Apa mau dikata, egoisme etis memang mengajarkan seseorang untuk mengatakan, "kita tidak mempunyai kewajiban moral, selain melulu menjalankan apa yang paling baik bagi diri kita sendiri."

Maka dalam fenomena jorjorannya guru "berburu" gelar, LPTK "menabur" gelar bisa dikatakan sebagai representasi dari mengesampingkan moralitas. Kepentingan guru dalam mengejar gelar secara tidaklangsung menafikan kepentingan orang lain (anak didik, suami/Istri dan anak) sehingga terbengkalai dan terpinggirkan. Dan perlu juga dipertanyakan nyambungnya antara 'gelar' dengan 'kompetensi' atau profesionalitas, bila dilakukan dengan formalitas tadi. Sedangkan bagi LPTK (pemberi gelar) dalam hal penyedia 'fasilitas' tidak berbanding lurus dengan produk yang berkualitas.

Berkaca dari fenomena ini, para guru seyogiyanya kembali mencermati pandangan bijak Prof. Otto Sumarwoto, bahwa kita jangan jadi bangsa yang "kagetan". Artinya sekarang ini para guru janganlah panik hanya untuk berburu gelar, sebaliknya sesudah itu, para guru malah kalangkabut menghadapi kenyataan terbengkalainya proses belajar anak didik, tidak terurusnya anak-anak, suami/istri di rumah, tumpukan utang yang menggantung, akibat terlalu jor-jorannya mengejar aspek formalitas itu. Seolah-olah itu merupakan kejadian tiba-tiba yang tidak terkait dengan kejadian di masa sebelumnya. Padahal, ini merupakan kejadian yang berhubungan, Coy! Cag Ah!

* *Pemerhati Budaya, Lektor Kepala pada Jurusan Pendidikan Bahasa Daerah FPBS UPI Bandung*